

Studi Literatur Pendidikan Anti Korupsi Pada Organisasi Sektor Publik

Edi Abral

Jurusan Tata Niaga, Politeknik Negeri Lhokseumawe

Korespondensi : ediabral@pnl.ac.id

Abstract . Organizations are made up of people who react differently to the impact of corruption. Organizational integrity includes the integration of systems, operational organization, strategy, control, corruption, and ethical standards, thereby creating norms of behavior. Another misconception is that corruption originates from organizations, not the individuals within them, as if ethical violations in practice occur almost by osmosis from organizations that are not accountable to those individuals. Individual efforts to eradicate corruption are likely to be less successful than efforts made by organizations. The transfer of money from individuals into organizational dynamics can be seen in the case of criminal corporations. Disruption if the organization provides a structural framework that eliminates the possibility of practical corruption. The ability of individuals to interpret rules or decide whether to implement certain protocols should be avoided in systems that cannot be manipulated.

Keynote: Integration, strategic management, anti-corruption and ethical standards,

Absrak . Organisasi terdiri individu yang bereaksi berbeda terhadap pengaruh korupsi. Integritas organisasi melibatkan integrasi sistem operasional organisasi, strategi pengendalian korupsi dan standar etika, sehingga tercipta norma perilaku etis. Aliran pemikiran ini beranggapan bahwa penyimpangan berasal dari organisasi, bukan individu di dalamnya, seolah-olah pelanggaran etika dalam praktik korupsi terjadi hampir secara osmosis dari organisasi yang tidak bertanggung jawab kepada individu. Individu dalam upaya antikorupsi kemungkinan besar kurang berhasil dibandingkan menargetkan konteks organisasi. Dari penyimpangan individu dalam dinamika organisasi dapat dilihat dalam kasus kejahatan korporasi. Disarankan agar organisasi menyediakan kerangka struktural yang menghilangkan kemungkinan praktik korupsi. Kemampuan individu untuk menafsirkan peraturan atau memutuskan dalam menerapkan protokol tertentu harus dielakkan dalam sistem yang tidak dapat dimanipulasi.

Kata Kunci: Integrasi, strategi pengendalian, anti korupsi dan standar etika.

PENDAHULUAN

Dalam merancang strategi antikorupsi, sangat penting untuk menyadari karakteristik mendasar dan sifat korupsi itu sendiri. Pada dasarnya, harus diakui dan dihargai bahwa teori penyebab korupsi harus ditafsirkan dalam konteks perilaku, pendorong dan interaksi manusia yang nyata dan/atau mungkin terjadi. Perlu juga dicatat bahwa beberapa komentator berpendapat bahwa kemajuan ekonomi sebenarnya bergantung pada, bukan terhambat oleh praktik korupsi. Sebuah analogi yang berguna untuk memahami dampak dan solusi terhadap korupsi adalah dengan membandingkan sifat korupsi dengan sifat pandemi. Yang terpenting, tekad untuk mempertimbangkan korupsi sebagai permasalahan yang paling baik diatasi dengan pendekatan holistik dibandingkan dengan pendekatan sektoral merupakan bagian integral dari strategi antikorupsi yang dirancang dengan baik. Masalah-masalah ini dibahas secara lebih rinci di bawah ini. Ada tiga aliran pemikiran utama mengenai pengurangan dan pencegahan korupsi.

Pertama, intervensionisme, dimana aparat terkait menunggu terjadinya tindakan korupsi lalu melakukan intervensi untuk menangkap dan menghukum pelakunya. Sekolah ini menstimulasi retribusi, rehabilitasi dan pencegahan namun masih terdapat beberapa variabel penghambat antara lain: kerugian telah terjadi dan tidak dapat diperbaiki, sebagian besar kejahatan masih belum dilaporkan. Permintaan terhadap sumber daya yang terbatas pasti akan menjadi tidak terbatas mengingat tingkat pengawasan yang diperlukan untuk memastikan bahwa efek pencegahan dapat berjalan. Jika angka kejahatan yang gelap menghalangi sebagian besar kejahatan untuk dideteksi, dilaporkan dan ditanggapi, tindakan pencegahan apa yang dapat dilakukan? Kedua, manajerialisme, dimana individu atau lembaga yang ingin terlibat dalam perilaku korupsi dapat dicegah atau dicegah untuk melakukan hal tersebut dengan menetapkan sistem, prosedur dan protokol yang sesuai. Intinya, manajerialisme menganjurkan pengurangan atau penghapusan peluang sedemikian rupa sehingga mereka yang pada umumnya mendapat manfaat dari peluang tersebut tidak lagi mampu melakukannya. Ada juga keterbatasan dalam aliran pemikiran ini, yang utama di antaranya adalah kenyataan bahwa individu tidak selalu beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip manajerialisme yang telah ditentukan sebelumnya.

Organisasi terdiri dari tiga kategori besar orang-orang yang akan bereaksi berbeda terhadap pengaruh korupsi. Integritas organisasi yang melibatkan integrasi sistem operasional organisasi, strategi pengendalian korupsi dan standar etika sehingga tercipta norma perilaku etis. Aliran pemikiran ini beranggapan bahwa penyimpangan berasal dari organisasi, bukan individu di dalamnya, seolah-olah pelanggaran etika dalam praktik korupsi terjadi hampir secara osmosis dari organisasi yang tidak bertanggung jawab kepada individu yang tidak bersalah di dalamnya. Dapat dikatakan bahwa menargetkan individu dalam upaya antikorupsi kemungkinan besar kurang berhasil dibandingkan menargetkan konteks organisasi di mana individu tersebut beroperasi. Dari penyimpangan individu dalam dinamika organisasi dapat dilihat dalam kasus kejahatan korporasi. Disarankan agar organisasi tersebut menyediakan kerangka struktural yang menghilangkan kemungkinan praktik korupsi. Singkatnya, kemampuan individu untuk menafsirkan peraturan atau memutuskan apakah

akan menerapkan protokol tertentu harus dielakkan oleh sistem yang tidak dapat dimanipulasi (Larmour & Wolanin, 2001).

STUDI KEPUSTAKAAN

Pertumbuhan Ekonomi

Dapat dikatakan bahwa solusi ekonomi terhadap tata kelola yang buruk tidak akan berhasil mendorong pertumbuhan atau meningkatkan kinerja pemerintah. Sebagaimana dicatat oleh Rose-Saldanha (2004) resep kebijakan akro-ekonomi mensyaratkan adanya pemerintahan yang berfungsi dengan baik, hal yang tidak terdapat di negara-negara korup'. Demikian pula, 'usulan untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan dengan memusatkan perhatian pada pertumbuhan ekonomi, keterbukaan perdagangan, dan pengurangan kesenjangan menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana negara-negara lemah dapat mencapai perubahan mendasar tersebut'. Didorong oleh bukti bahwa korupsi mengurangi pertumbuhan dan investasi di negara-negara berkembang, Bank Dunia mengembangkan strategi empat dimensi: mencegah penipuan dan korupsi dalam proyek-proyek Bank Dunia, membantu negara-negara yang meminta bantuan Bank Dunia untuk memerangi korupsi, mengarusutamakan kepedulian terhadap korupsi dalam seluruh pekerjaan Bank Dunia, memberikan dukungan aktif terhadap upaya internasional dalam memerangi korupsi. Kritik ditujukan kepada Bank Dunia karena membingkai aktivitasnya dalam istilah ekonomi. Pertama, disarankan agar strategi antikorupsi Bank Dunia didasarkan pada persepsi pembangunan ekonomi dimana keberhasilan didorong oleh pasar yang efisien yang didukung oleh negara-negara non-intervensi. Kedua, data empiris yang menunjukkan adanya hubungan kuat antara korupsi dan pembangunan yang buruk, diduga memiliki kelemahan. Meskipun korupsi mempunyai sejumlah dampak negatif, terdapat dugaan bahwa di negara-negara seperti Tiongkok dan Korea Selatan. korupsi sebenarnya merajalela pada tahap-tahap penting perkembangan kapitalis (Transparansi Internasional, 2004).

Argumen bahwa korupsi sebenarnya bisa menguntungkan, mengingat bahwa korupsi bisa memfasilitasi partisipasi dan keterwakilan kelompok-kelompok marginal termasuk para pengusaha dan pengusaha, yang tidak mempunyai jalur formal untuk mendorong tindakan pemerintah dalam

memfasilitasi kegiatan ekonomi mereka. Korupsi dapat memberikan hasil yang efisien jika peraturan pemerintah yang berlebihan merugikan kegiatan peningkatan pertumbuhan. Oleh karena itu, menyuap pejabat untuk memotong birokrasi mungkin merupakan suatu bentuk deregulasi yang memungkinkan masyarakat untuk bekerja lebih efisien. Apa yang disebut sebagai uang cepat (speed money) ini membantu mendorong pejabat pemerintah yang dibayar rendah dan tidak mempunyai motivasi untuk melakukan pekerjaan mereka dengan baik (Quah, 2003). Pers Universitas Timur Seperti yang dikatakan oleh komentator lain, dalam hal pertumbuhan ekonomi, satu-satunya hal yang lebih buruk adalah masyarakat yang memiliki birokrasi yang kaku, terlalu tersentralisasi, dan tidak jujur adalah masyarakat yang memiliki birokrasi yang kaku, terlalu tersentralisasi, dan jujur (Johnston M dan Kpundeh, 2002). Pendukung yang paling nyata dari pendekatan berlapis dan holistik terhadap antikorupsi adalah Transparency International yang beroperasi dari 'keyakinan bahwa semua permasalahan yang menjadi perhatian kontemporer di bidang pemerintahan...perlu ditangani secara holistic. Menyadari perbedaan yang sering kali signifikan antara kemauan dan kapasitas negara-negara dalam menciptakan, merancang, dan melaksanakan strategi antikorupsi yang efektif, Transparency International menyarankan Sistem Integritas Nasional (NIS).

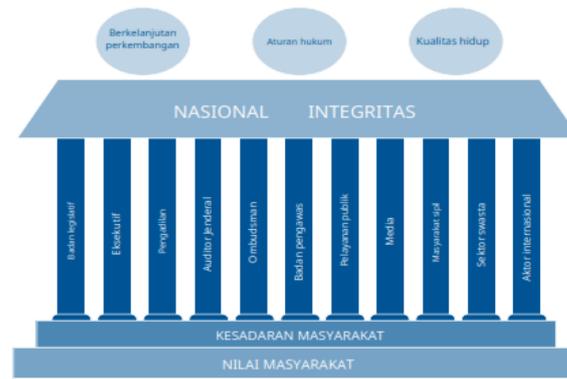
Pencegahan Korupsi

Untuk melakukan pemberantasan korupsi yang merupakan bagian dari perjuangan yang lebih luas melawan pelanggaran dan penyelewengan serta untuk menciptakan pemerintahan yang efisien dan efektif yang menganggap alasan utamanya bekerja untuk kepentingan publik. Tujuan utamanya adalah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, yang dianggap oleh beberapa komentator sebagai komponen penting dalam upaya antikorupsi. Transparency International berlandaskan harapannya secara keseluruhan, dengan menyatakan bahwa tujuannya bukanlah perbaikan sepenuhnya atau penyembuhan atau perbaikan yang hanya dilakukan satu kali saja, namun peningkatan kejujuran atau integritas pemerintah secara keseluruhan. Memenuhi tujuan keseluruhan Integritas memerlukan penyediaan layanan publik yang efisien dan efektif serta membantu menjaga pembangunan berkelanjutan, pemerintahan yang berfungsi penuh, sadar dan mampu melindungi, hak-hak warga negaranya, dan strategi untuk memastikan bahwa

pembangunan masyarakat berlaku untuk semua negara. anggotanya, bukan bagian atau faksi di dalamnya.

Kompleksitas dan mengakarnya korupsi, Transparency International bukanlah alat yang pasif, juga tidak bergantung pada pilar-pilar yang ada atau pada kombinasi pilar-pilar tertentu. Pilar-pilar yang diidentifikasi di atas harus diintegrasikan semaksimal mungkin. Sebagaimana apa manfaat dari peradilan yang sehat dan bersih yang siap menjunjung Supremasi Hukum, jika terdapat korupsi di kepolisian, penyidik, jaksa atau profesi hukum? Para Hakim tidak akan menerima kasus yang seharusnya mereka dengar; mereka kemudian akan duduk dalam isolasi yang luar biasa jujur, mampu, namun hanya mampu mencapai sedikit hal.' Pilar-pilar tersebut mungkin perlu 'terbukti korupsi', yaitu, langkah-langkah mungkin perlu diambil untuk memastikan bahwa kelemahan pada satu pilar (misalnya jurnalisme investigatif yang buruk atau tidak ada) dapat dikurangi dengan kekuatan pada pilar lainnya (misalnya pilar anti-korupsi). Dengan demikian, dampak dari gabungan pilar-pilar tersebut memberikan kekuatan pada strategi antikorupsi secara keseluruhan. Kekuatan gabungan dari pilar-pilar tersebut kemudian ditingkatkan lebih lanjut dengan penerapan nilai-nilai inti dan/atau praktik umum yang melekat pada masing-masing pilar. Upaya apa pun untuk memberantas korupsi publik pertama-tama perlu menciptakan komitmen dan kesadaran di kalangan politisi dan pejabat publik terkemuka karena mereka memiliki kemampuan untuk mendorong atau menggagalkan upaya antikorupsi. Dampak akhir dari keterlibatan positif tersebut adalah peningkatan transparansi dalam partai politik dan perubahan organisasi yang radikal dalam pelayanan publik, yang dianggap sebagai pusat praktik korupsi.

Demikian pula, perlu adanya pengakuan atas korupsi yang tidak terkekang dalam hubungan bisnis-negara dan dalam hubungan simbiosis antara kejahatan terorganisir, bisnis, penegakan hukum, peradilan dan kalangan pemerintah, agar upaya-upaya yang dimotori oleh pemerintah dan pelayanan publik tidak menjadi mubazir. Yang terakhir, khususnya di negara-negara berpendapatan rendah, proses pembangunan yang digalakkan, yang mana infrastruktur ekonomi dan sosial ditingkatkan, hanya akan berfungsi untuk memperkuat kerangka anti-korupsi yang telah dibuat.



Gambar 1 Sistem Integritas Nasional

METODE DAN PEMBAHASAN

Strategi antikorupsi yang baik mempertimbangkan tingkat dan derajat interaksi formal dan informal antara lembaga, organisasi, dan individu. Strategi tersebut harus mencakup perubahan dalam praktik sektor publik dan swasta. Selain itu, upaya harus dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap praktik korupsi dan menggalang dukungan masyarakat dalam mendeteksi dan melaporkan perilaku korupsi. Masalah-masalah ini dibahas secara lebih rinci di bawah ini.

Sektor publik

Ada pendapat bahwa strategi yang mengurangi manfaat dari membayar dan/atau menerima suap hanya akan memberikan hasil positif bagi upaya antikorupsi. Reformasi pelayanan sipil (publik) merupakan kebijakan awal yang penting. Pemberian gaji yang memadai merupakan langkah awal yang berguna karena, jika dinas tersebut memberikan gaji yang lebih rendah daripada yang dapat diperoleh oleh pegawai dengan kualifikasi serupa di tempat lain, maka ada kemungkinan bahwa pegawai negeri akan tergoda untuk melakukan suap. Namun, ada kemungkinan bahwa gaji yang lebih tinggi hanya akan meningkatkan jumlah suap yang diminta oleh pejabat terkait. Oleh karena itu, penting untuk menghapuskan tunjangan lain (seperti skema pensiun) bagi pegawai negeri sipil yang, meskipun menerima kenaikan gaji, namun tetap melakukan perilaku korupsi. Seleksi pegawai negeri juga harus dilakukan secara transparan, untuk menghindari potensi penyuapan terhadap pejabat dalam rangka mendapatkan jabatan di pemerintahan. Kontrol pegawai negeri tingkat lebih lanjut, yang berkaitan dengan pemberi suap dan penerima suap, juga dapat

diterapkan di mana pegawai negeri yang menerima suap dapat dikenakan denda beberapa kali lipat dari suap yang diterima, serta kehilangan jabatan, pensiun, dan sebagainya. manfaat. Penyup dapat dikenakan sanksi berdasarkan keuntungan yang diperoleh dari suap tersebut (jika, misalnya, suap memfasilitasi diperolehnya kontrak yang menguntungkan) dan bukan dalam kaitannya dengan tingkat suap itu sendiri. Demikian pula, dimungkinkan untuk memasukkan prosedur pencekalan yang akan mencegah penyup untuk membuat kontrak dengan pemerintah pada proyek apa pun untuk jangka waktu tertentu dan melemahkan ekonomi.

Reformasi lain seperti reformasi peradilan dan penyediaan badan peninjauan dan investigasi independen sangat penting agar reformasi pegawai negeri dapat berdampak sepenuhnya. Secara lebih luas, korupsi dalam pelayanan publik dapat dikurangi dengan mengurangi manfaat yang berada di bawah kendali pejabat. Pertama, ada kemungkinan untuk menghilangkan program-program yang diidentifikasi mengandung praktik korupsi. Jadi, misalnya, jika suatu departemen luar negeri tidak mempunyai kewenangan langsung untuk membatasi ekspor atau memberikan izin usaha (keduanya merupakan aktivitas yang memfasilitasi permintaan pembayaran yang korup), karena keputusan tersebut diambil oleh badan independen, maka tidak ada gunanya meminta suap atau disodorkan. Kedua, jika kebijakan meningkatkan privatisasi maka persaingan akan mengendalikan kontrak dibandingkan penyup terhadap negara yang memonopoli. Jika proses privatisasi tidak dikelola secara sistematis dan holistik, maka masih ada kemungkinan terjadinya perpindahan korupsi. Sayangnya, ketika bawang bombay mendekati pasar makanan di Abidjan, suap malah dicari dan dibayarkan di tempat tersebut. Ketika keterlibatan pemerintah dalam pertukaran keuangan sangat penting, misalnya dalam hal pengumpulan pendapatan pajak, permasalahannya adalah reformasi proses dalam menyederhanakan proses administrasi untuk mengurangi kemampuan pejabat dalam meminta pembayaran. Upaya lain mungkin termasuk memberi penghargaan kepada mereka yang melaporkan penyimpangan pegawai negeri lainnya dan rotasi staf untuk mencegah terbentuknya korupsi yang sudah mengakar. Namun, hal ini perlu didekati dengan hati-hati, mengingat jika departemen tersebut benar-benar korup, maka rotasi akan berdampak terbatas dan pegawai yang jujur

mungkin akan diberi tugas yang tidak menyenangkan karena gagal melakukan perilaku korup.

Reformasi pegawai negeri atau penciptaan pegawai negeri yang profesional dan bermotivasi baik merupakan bagian integral dari proses antikorupsi. Penunjukan politik mengganggu kestabilan pelayanan sipil, melemahkan kesinambungan dan menghambat pengembangan nilai-nilai dan standar kelembagaan. Terdapat kebutuhan akan mekanisme rekrutmen dan promosi berdasarkan prestasi yang dapat membatasi patronase politik dan menciptakan layanan sipil yang tidak memihak, dikombinasikan dengan pemantauan yang kredibel dan penegakan hukum. Peningkatan reformasi gaji bagi pegawai negeri sering kali terjadi digambarkan sebagai hal yang penting, namun reformasi gaji saja tidak akan menghilangkan insentif bagi korupsi birokrasi dimana pegawai negeri sipil tingkat tinggi tetap memegang kendali atas sumber daya. Keberhasilan reformasi pegawai negeri juga bergantung pada independensi dan integritas sistem peradilan. Reformasi peradilan bertujuan untuk menerapkan mekanisme yang memberikan stabilitas pekerjaan, jalur karir dan gaji yang memadai. Hal ini juga memerlukan penguatan kantor kejaksaan dan pembela serta pembentukan pengendalian internal untuk mencegah korupsi dalam sistem peradilan melalui entitas seperti kode etik profesi dan sistem inspeksi.

Sektor Swasta

Sektor bisnis juga harus diikutsertakan dalam pendekatan antikorupsi. Kerja sama ini harus diatur melalui penciptaan praktik pengaturan mandiri dalam bentuk kode etik yang tunduk pada pemantauan eksternal dan obyektif. Tujuannya harus ditempatkan secara realistis pada penetapan dan kepatuhan terhadap standar minimum. Namun, model ini telah menuai kritik dari para komentator mengenai aktivitas korporasi di negara maju dan sebagian besar telah digantikan oleh undang-undang dan kerangka peraturan terkait. Sektor usaha secara historis dipandang sebagai bagian dari masalah korupsi dan bukan sebagai pusat mitigasinya, mengingat bahwa sektor usaha telah lama menyadari keunggulan kompetitif yang dapat dicapai melalui tindakan suap selektif, baik dalam situasi pembayaran yang terang-terangan atau dalam situasi yang lebih buruk. pembayaran uang cepat yang umum (dan secara korporasi lebih dapat dimaafkan) kepada minyak, dibandingkan memulai roda birokrasi. Pengenalan Konvensi Pemberantasan Suap Pejabat Publik Asing dalam Transaksi Bisnis

Internasional, dapat dikatakan, telah memberikan tekanan pada sektor bisnis untuk mengembangkan sistem manajemen integritas. Disarankan bahwa sistem tersebut perlu mencerminkan budaya perusahaan dan budaya negara di mana sistem tersebut beroperasi.

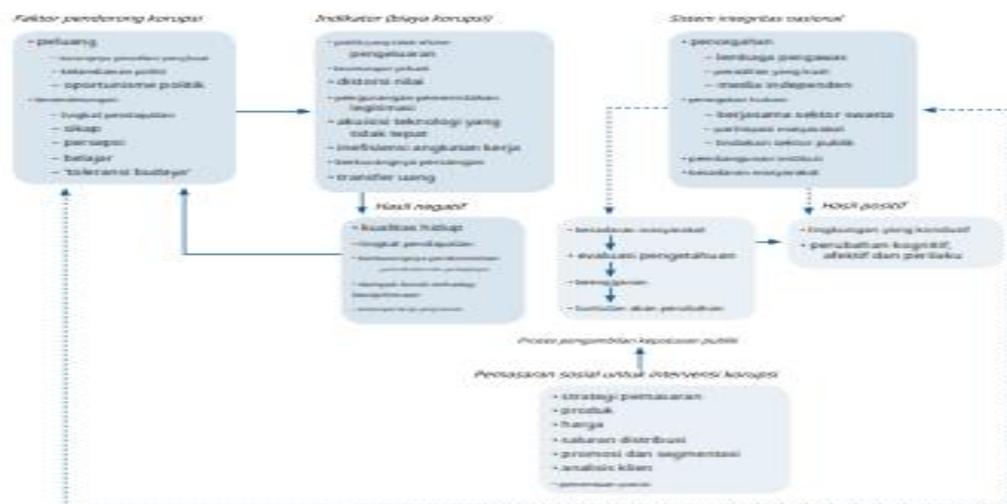
Permasalahan lainnya adalah interaksi antara sektor publik dan swasta yang, dalam lingkungan industri yang semakin maju, telah memfasilitasi praktik-praktik yang saling menguntungkan namun juga korup. Hal ini dikatakan sangat akut di negara-negara kecil yang warganya mungkin dipengaruhi oleh kesetiaan kekerabatan yang mungkin mencakup upaya anti-korupsi yang lebih luas. Dampak dari diskontinuitas ini dapat diperburuk jika tingkat pengetahuan dan pemahaman mengenai dampak korupsi berkelanjutan yang lebih luas terhadap suatu masyarakat berada pada tingkat yang rendah. OECD telah mengembangkan pedoman untuk mengelola konflik kepentingan dalam pelayanan publik yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan permasalahan ini dan menetapkan contoh-contoh perilaku terlarang, yang jika terjadi akan mengakibatkan praktik korupsi (Luo, 2002).

Mengingat kekuatan finansialnya, dunia usaha perlu memainkan peran utama dalam menyusun dan menerapkan etika, strategi, dan pendekatan perusahaan. Elemen kunci dari transparansi adalah ketersediaan dan akses bebas terhadap informasi. Namun, di banyak negara ada praktik birokrasi yang bertentangan dengan sistem atau mekanisme pengungkapan yang memungkinkan masyarakat menilai kinerja pejabat sektor publik atau mengevaluasi dampak kemajuan atau proyek pemerintah. Sebagai katalisator perubahan dalam pemberantasan korupsi, LSM dapat mengangkat kepedulian terhadap korupsi dan menghancurkan tradisi panjang pengambilan keputusan vertikal dalam pengelolaan urusan publik yang melemahkan proses transparansi dan akuntabilitas. Meskipun bernilai, penting untuk tidak melebih-lebihkan pentingnya jurnalisme investigatif.

Dukungan Publik

Sudah lama diyakini bahwa kampanye antikorupsi tidak akan berhasil tanpa memperoleh dan mempertahankan dukungan masyarakat. Dua strategi yang luas dan saling melengkapi dapat meningkatkan dukungan dan dampak terhadap keberhasilan strategi antikorupsi. Pertama, ada program kesadaran masyarakat yang fokus pada kerugian akibat korupsi, penyalahgunaan uang

publik, penolakan akses terhadap layanan publik, dan kewajiban publik untuk menyampaikan keluhan ketika pejabat publik bertindak korup. Kedua, pemberdayaan organisasi masyarakat sipil sejauh diperlukan agar mereka mampu memantau, mendeteksi, dan membalikkan aktivitas pejabat publik di tengah-tengah mereka. Strategi ini melibatkan pemanfaatan dan pemanfaatan keahlian akuntan, pengacara, akademisi, organisasi non-pemerintah, sektor swasta, pemimpin agama, dan masyarakat umum (Larmour, 2002). Meningkatkan tingkat kesadaran masyarakat dan dengan demikian meningkatkan tingkat keberhasilan keterlibatan dalam strategi antikorupsi dapat dicapai melalui pemasaran sosial. Proses ini dapat meningkatkan kesadaran akan dampak korupsi bagi suatu negara, organisasinya, dan warganya. Hal ini dapat memastikan bahwa korupsi menjadi perhatian utama bagi lembaga-lembaga nasional (yang pada gilirannya akan mampu memberikan tingkat kepedulian yang lebih nyata terhadap praktik korupsi dan tingkat keterlibatan yang lebih tinggi dalam upaya anti-korupsi sehingga memberikan dukungan berkelanjutan bagi strategi tersebut). Hal ini dapat meningkatkan tingkat pemahaman masyarakat mengenai faktor-faktor penyebab korupsi dan menunjukkan beragamnya manifestasi dan tipologi korupsi. Hal ini pada akhirnya dapat berdampak positif terhadap perilaku individu yang korup dan berpotensi korup (Keuleers P 2002)



Gambar 2 Strategi Sosial Melawan Korupsi

KEPUSTAKAAN

- Johnston, M & Kpundeh S (2002). Membangun mesin yang bersih: koalisi anti-korupsi dan reformasi berkelanjutan. Kertas kerja Institut Bank Dunia 28639. <http://siteresources.worldbank.org/WBI/Resources/wbi37208.pdf>.
- Keuleers P (2002). Korupsi di Laos: penyebab mendasar dan permasalahan utama yang perlu dipertimbangkan. Bangkok: UNDP.
- Larmour P (2002). Transfer kebijakan di Papua Nugini dan Pasifik Selatan: kapan, bagaimana, siapa, apa dan dari mana? Buletin ekonomi Pasifik17(2): 55–67
- Larmour P & Wolanin N. (2003). Korupsi dan anti korupsi. Canberra: Institut Kriminologi Australia dan Pers Asia Pasifik.
- Luo Y 2002. Korupsi dan organisasi dalam sistem manajemen Asia.Jurnal Manajemen Asia Pasifik19 (2–3): 405–422.
- Saldanha. C. (2004). Strategi tata pemerintahan yang baik di Pasifik.Literatur ekonomi Asia Pasifik 18(2): 30–43
- Transparansi Internasional. (2004) Laporan korupsi global tahun 2004.London: Pluto Pers. http://www.transparency.org/publications/gcr/download_gcr/download_gcr_2004#download
- Quah J (2003). Pemberantasan korupsi di Asia: studi perbandingan di enam negara,edisi ke-2. Singapura: Pers Universitas Timur.